



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Oktober 2017
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 18.00 WIB s.d 18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Pengesahan hasil pembahasan rincian program dan alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga/Badan mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Bapel BPWS beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 18.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan semua mitra Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah pengesahan hasil pembahasan rincian program dan alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga/Badan mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018.
3. Ketua Rapat mempersilakan mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk menyampaikan jawaban pertanyaan dan tanggapan terhadap pertanyaan para anggota Komisi V DPR RI dalam rapat yang lalu.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas); dan Bapel BPWS menyetujui alokasi anggaran dan program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/UNIT KERJA	Pagu RAPBN TA 2018 (Hasil Raker/RDP Komisi V DPR RI 6-18 Sept 2017)	PERUBAHAN			TOTAL
			PAGU PENGUNAAN PNBP	PAGU PENGUNAAN BLU	Prioritas	
1.	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	106.911.317.301	-	-	475.000.000	107.386.317.301
a.	Sekretariat Jenderal	600.000.003	-	-	-	600.000.003
	(Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR)	301.104.193	-	-	-	301.104.193
	(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR)	298.895.810	-	-	-	298.895.810
b.	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR)	104.974.960	-	-	-	104.974.960
c.	Ditjen Bina Marga (Program Penyelenggaraan Jalan)	41.398.066.930	-	-	275.000.000	41.673.066.930
d.	Ditjen Cipta Karya (Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman)	15.909.202.581	-	-	200.000.000	16.109.202.581
e.	Ditjen Sumber Daya Air	37.309.551.551	-	-	-	37.309.551.551
	(Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	36.903.453.526	-	-	-	36.903.453.526
	(Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo)	406.098.025	-	-	-	406.098.025
f.	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (Program Pengembangan Perumahan)	9.633.756.042	-	-	-	9.633.756.042
g.	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan (Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan)	261.638.463	-	-	-	261.638.463
h.	Badan Penelitian Dan Pengembangan (Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR)	611.986.939	-	-	-	611.986.939
i.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Program Pembinaan Konstruksi)	338.716.396	-	-	-	338.716.396
j.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah)	248.359.063	-	-	-	248.359.063

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/UNIT KERJA	Pagu RAPBN TA 2018 (Hasil Raker/RDP Komisi V DPR RI 6-18 Sept 2017)	PERUBAHAN			TOTAL
			PAGU PENGUNAAN PNBP	PAGU PENGUNAAN BLU	Prioritas	
k.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia)	495.064.373	-	-	-	495.064.373
2	Kementerian Perhubungan	48.187.626.957	(52.662.192)	68.144.661	-	48.203.109.426
a.	Sekretariat Jenderal (Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan)	580.135.964	-	-	-	580.135.964
b.	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan)	106.110.822	-	-	-	106.110.822
c.	Ditjen Perhubungan Darat (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Darat)	4.582.007.686	-	-	-	4.582.007.686
d.	Ditjen Perhubungan Laut (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Laut)	11.600.486.955	-	-	-	11.600.486.955
e.	Ditjen Perhubungan Udara (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Udara)	9.146.557.582	(52.662.192)	68.144.661	-	9.162.040.051
f.	Ditjen Perkeretaapian (Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Perkeretaapian)	17.296.256.780	-	-	-	17.296.256.780
g.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan)	4.527.496.007	-	-	-	4.527.496.007
h.	Badan Penelitian dan Pengembangan (Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Perhubungan)	143.830.906	-	-	-	143.830.906
i.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek)	204.744.255	-	-	-	204.744.255
3.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	5.145.253.061	-	-	-	5.145.253.061
a.	Sekretariat Jenderal (Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi)	278.775.543	-	-	-	278.775.543
b.	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi)	57.060.378	-	-	-	57.060.378
c.	Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informasi (Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi)	280.557.341	-	-	-	280.557.341

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/UNIT KERJA	Pagu RAPBN TA 2018 (Hasil Raker/RDP Komisi V DPR RI 6-18 Sept 2017)	PERUBAHAN			TOTAL
			PAGU PENGUNAAN PNBP	PAGU PENGUNAAN BLU	Prioritas	
d.	Ditjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	2.822.670.394	-	-	-	2.822.670.394
e.	Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (Program Pembangunan Kawasan Perdesaan)	332.081.502	-	-	-	332.081.502
f.	Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (Program Pengembangan Daerah Tertentu)	262.792.792	-	-	-	262.792.792
g.	Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (Program Pembangunan Daerah Tertinggal)	320.060.761	-	-	-	320.060.761
h.	Ditjen Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi)	391.254.350	-	-	-	391.254.350
i.	Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)	400.000.000	-	-	-	400.000.000
4.	BMKG	1.702.912.962	-	-	-	1.702.912.962
	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	532.180.922	-	-	-	532.180.922
	Pengembangan dan Pembinaan MKG	1.170.732.040	-	-	-	1.170.732.040
5.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	2.035.099.560	-	-	200.000.000	2,235,099,560
	Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	569.717.524	-	-	-	569,717,524
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	160.018.870	-	-	-	160,018,870
	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	1.305.363.166	-	-	200.000.000	1,505,363,166

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/UNIT KERJA	Pagu RAPBN TA 2018 (Hasil Raker/RDP Komisi V DPR RI 6-18 Sept 2017)	PERUBAHAN			TOTAL
			PAGU PENGUNAAN PNBP	PAGU PENGUNAAN BLU	Prioritas	
6.	Bapel-BPWS	242.479.384	-	-	-	242.479.384
	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	29.390.766	-	-	-	29.390.766
	Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	213.088.618	-	-	-	213.088.618

Catatan:

Fraksi Gerindra tidak menyatakan persetujuan terhadap kebijakan FLPP menjadi subsidi selisih bunga, karena kebijakan ini akan sangat mempengaruhi target pencapaian perumahan dan akan menjadi beban bagi pemerintahan mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 19 Oktober 2017

KETUA RAPAT,

FARY DJEMY FRANCIS

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

M. BASOEKI HADIMOELJONO

Plt. KEPALA BMKG,

WIDADA SULISTYA

MENTERI PERHUBUNGAN,

BUDI KARYA SUMADI

Plt. KEPALA BAPEL BPWS

HERMAN HIDAYAT

**MENTERI DESA, PDT,
DAN TRANSMIGRASI**

EKO PUTRO SANDUJOJO

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,**

M. SYAUGI